



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## DAMPAK PERANG IRAN-ISRAEL TERHADAP HARGA BBM SUBSIDI

**Yosua Pardamean Samuel**  
Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[yosua.samuel@dpr.go.id](mailto:yosua.samuel@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Ketidakstabilan geopolitik kerap menjadi faktor utama yang mendorong perubahan harga energi global, terutama minyak mentah yang merupakan komoditas vital bagi banyak negara. Salah satu peristiwa yang baru-baru ini mencuat adalah konflik bersenjata antara Iran dan Israel pada pertengahan Juni 2025. Ketegangan ini menimbulkan kekhawatiran terhadap gangguan pasokan energi dunia, yang kemudian memicu lonjakan harga minyak secara global. Berdasarkan data terkini, harga minyak pada 16 Juni 2025 mencapai US\$70,90 per barel naik sekitar 10 persen dibandingkan harga satu bulan sebelumnya. Lembaga keuangan global, JP Morgan Chase, memproyeksikan bahwa apabila Iran menutup Selat Hormuz, harga minyak berpotensi melonjak hingga US\$130 per barel. Hal ini karena Selat Hormuz merupakan jalur penting yang mengangkut hampir 20 persen minyak global. Prediksi tersebut mendekati rekor harga tahun 2022 yang sempat mencapai US\$139 per barel akibat krisis Rusia-Ukraina.

Kenaikan harga minyak yang signifikan ini berdampak langsung terhadap negara pengimpor minyak seperti Indonesia. Walaupun Indonesia memiliki sumber daya minyak domestik, kebutuhan energinya yang tinggi membuat ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) tetap besar. Dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi energi sebesar Rp203,41 triliun, naik 1,9 persen dari tahun sebelumnya. Anggaran ini disusun dengan asumsi harga *Indonesian Crude Price* (ICP) di kisaran US\$82 per barel dan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp16.000. Namun, apabila harga minyak global terus melampaui asumsi tersebut, beban subsidi akan meningkat dan menyebabkan tekanan terhadap anggaran negara.

Selain membebani APBN, eskalasi harga minyak juga memengaruhi stabilitas ekonomi melalui jalur eksternal. Naiknya harga impor BBM akan menyedot cadangan devisa negara dan memperlemah nilai tukar rupiah. Pada pertengahan Juni 2025, nilai tukar rupiah sempat menurun hingga Rp17.000 per dolar AS, mencerminkan tekanan yang cukup besar terhadap kestabilan moneter nasional. Depresiasi nilai tukar ini tidak hanya meningkatkan biaya impor, tetapi juga mendorong laju inflasi domestik akibat kenaikan harga barang konsumsi dan kebutuhan pokok.

Situasi tersebut menempatkan pemerintah dalam posisi yang sulit. Jika subsidi BBM tetap dipertahankan, beban fiskal akan meningkat secara signifikan. Namun, jika harga BBM subsidi dinaikkan, risiko inflasi akan meningkat dan mengancam daya beli masyarakat, terutama kelompok dengan pendapatan rendah. Kenaikan harga energi juga berimplikasi terhadap biaya logistik dan transportasi, yang secara langsung mendorong kenaikan harga-harga barang di pasaran. Apabila tidak ditangani secara tepat, situasi ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam menghadapi ketidakpastian tersebut, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang bersifat strategis dan berorientasi jangka panjang. Upaya memperkuat ketahanan energi melalui diversifikasi sumber daya, peningkatan cadangan strategis, dan efisiensi konsumsi energi menjadi sangat krusial.

Di sisi lain, sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter juga diperlukan guna menjaga stabilitas makroekonomi. Selain itu, keterbukaan informasi dan komunikasi publik yang efektif sangat dibutuhkan agar masyarakat dapat memahami arah kebijakan dan mendukung langkah-langkah yang diambil pemerintah. Dengan demikian, dinamika harga minyak yang dipicu oleh konflik geopolitik menegaskan urgensi bagi Indonesia untuk membangun sistem energi yang tangguh dan memperkuat kapasitas ekonomi nasional agar mampu bertahan menghadapi tekanan global.

## Atensi DPR

Konflik antara Iran dan Israel berpotensi memicu kenaikan tajam harga minyak dunia, yang berdampak langsung terhadap harga BBM subsidi di Indonesia. Untuk mengurangi dampak tersebut, pemerintah perlu mengambil langkah strategis. DPR RI melalui Komisi VI, memiliki peran penting dalam memastikan koordinasi terkait ketahanan pasokan BBM dalam negeri antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berjalan dengan baik. Hal ini agar respons kebijakan cepat, efektif, dan tepat. Di tengah keterbatasan anggaran negara, efisiensi penggunaan energi menjadi hal yang sangat penting, termasuk memastikan penyaluran subsidi BBM tepat sasaran. Dalam hal ini, Komisi VI perlu mengawasi kinerja BUMN yang terdampak lonjakan harga minyak, agar tercapainya efisiensi dan ketahanan pasokan BBM. Transparansi informasi dan komunikasi publik yang baik juga diperlukan agar masyarakat memahami kebijakan yang diambil pemerintah. Respons cepat, koordinatif, dan komunikatif menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat di tengah gejolak global yang terjadi.

## Sumber

bisnis.com, 18 Juni 2025;  
detik.com, 17 Juni 2025;  
kompas.id, 18 Juni 2025;  
kontan.co.id, 17 Juni 2025;  
tempo.co, 17 Juni 2025.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Venti Eka Satya  
Teddy Prasetiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.  
Ulayya Sarfina  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi  
Muhammad Insan F.  
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikhah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making*